



## **Analisis Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia**

### ***Analysis of Poverty Levels in North Sumatera and Their Relationship with the Human Development Index***

**Marhamah<sup>1</sup>, Dadang Sukandar<sup>2</sup>, Bahrul Khair Amar<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan FST, Universitas Terbuka

<sup>2</sup> Departemen Gizi Masyarakat, FEMA-IPB University

<sup>3</sup> Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

---

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dan kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian menggunakan desain *cross-sectional*, memanfaatkan data sekunder dari BPS tahun 2022. Analisis tingkat kemiskinan digunakan data persentase penduduk miskin, Indeks kedalaman dan Keparahan Kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung berdasarkan komponen IPM yang terdiri atas umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Analisis bivariat dilakukan untuk mengamati hubungan persentase kemiskinan, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kemiskinan (P0), tingkat kedalaman (P1), tingkat Keparahan (P2) Kemiskinan berkorelasi negatif signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara; sedangkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, umur harapan hidup dan besar pengeluaran ril perkapita yang disesuaikan berkorelasi positif signifikan terhadap IPM. Terdapat hubungan negatif meskipun tidak signifikan antara kemiskinan (P0), tingkat kedalaman (P1) dan keparahan (P2) kemiskinan terhadap stunting, namun tidak ada hubungan dengan BBLR. Kemiskinan dan ketimpangan secara bersama-sama berkontribusi sebesar 77.4 % terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara.

**Kata Kunci:** *Indeks Keparahan Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, IPM, presentase penduduk miskin*

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the poverty level in North Sumatra Province and its relation to the Human Development Index. The study uses a cross-sectional design, utilizing secondary data from BPS in 2022. Poverty level analysis uses data on the percentage of poor population, poverty depth index, and poverty severity index. The Human Development Index (HDI) is calculated based on HDI components consisting of longevity and healthy life, knowledge, and decent standard of living. Bivariate analysis was conducted to observe the relationship between poverty percentage, poverty depth, and poverty severity to the Human Development Index. The results show that poverty percentage (P0), poverty depth (P1), and poverty severity (P2) have a significant negative correlation with the HDI in North Sumatra Province, while average years of schooling, expected years of schooling, life expectancy, and adjusted real per capita expenditure have a significant positive correlation with the HDI. There is a negative relationship between poverty (P0), poverty depth (P1), and poverty severity (P2) with stunting, but no relationship with low birth weight. Poverty and inequality together contribute 77.4% to the HDI in North Sumatra Province.*

**Keywords:** *Human Development Index, percentage of poor people, poverty severity index, poverty depth index*

**How to Cite:** Marhamah, D. Sukandar & B. K. Amal. (2023). Analisis Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 9 (1): 45-57.

---

\*Corresponding author:

E-mail: [marhamah@ecampus.ut.ac.id](mailto:marhamah@ecampus.ut.ac.id)

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

## **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan yang pesat dari proses pembangunan telah menampakkan hasilnya. Namun, masalah kemiskinan global ternyata masih terjadi dalam berbagai dimensi dan mengakar. Setiap tahun, lima juta anak di bawah lima tahun meninggal akibat penyakit dan saat ini, sebagian besar anak-anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah yang duduk di bangku sekolah dasar, banyak diantara mereka memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang rendah. World Bank (2022), mencatat bahwa dalam tiga dekade terakhir, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Sayangnya tren tersebut terhenti pada tahun 2020, krisis yang diakibatkan oleh Covid menyebabkan angka kemiskinan Kembali meningkat. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem meningkat mencapai lebih dari 700 juta orang. Tingkat kemiskinan ekstrem global mencapai 9,3 persen, naik dari 8,4 persen pada tahun 2019.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dirumuskan bahwa sasaran pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Menyongsong bonus demografi tahun 2030, populasi masyarakat yang besar, menjadi modal keberlangsungan pembangunan.

Diperlukan SDM berkualitas untuk mendukung terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi justru dapat membebani pembangunan.

Kualitas SDM dapat mempengaruhi status kemiskinan, semakin rendah kualitas SDM maka potensi kemiskinan akan semakin besar. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Keberhasilan menuntaskan masalah kemiskinan merupakan hasil dari proses pembangunan.

Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Manusia merupakan subjek dari proses pembanguan, karena pembangunan berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup manusia. Paradigma pembangunan awalnya dititikberatkan pada perbaikan kondisi ekonomi, namun, berbagai penelitian membuktikan bahwa pembangunan ekonomi saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, perlu adanya pembangunan pendidikan dan kesehatan yang merupakan sektor penting di kehidupan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat ukur pembangunan manusia karena IPM mengukur kualitas hidup manusia melalui tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM juga dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara dan merupakan indikator penting untuk mengukur

keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk).

IPM juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kebijakan. Prioritas pembangunan dan daerah sasaran target program kegiatan, dapat diseleksi berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2022, Sumatera Utara memiliki IPM 72,72, masuk dalam kategori IPM tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ). Jika dilihat berdasarkan Kabko, sebagian besar Kabko (67,6%) di Sumatera Utara memiliki IPM dengan kategori tinggi. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 72,00 pada tahun 2021, menjadi 72,71 pada tahun 2022 (meningkat 0,71 poin). Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta standar hidup layak (diukur dari besar pengeluaran per kapita disesuaikan), dengan selisih kenaikan poin sebesar 0,38; 0,13; 0,04 dan 349 (ribu rupiah) secara berturut-turut.

Tingkat kemiskinan secara umum diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu persentase kemiskinan (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Selama periode Maret 2021–Maret 2022 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan, dari 9,01% pada Maret 2021 menjadi 8,42% pada Maret 2022 atau berkurang sebesar 0,59 poin. Untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1), terjadi penurunan sebesar 0,157 poin, dari

1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,365 pada Maret 2022. Penurunan indeks kedalaman kemiskinan ini menunjukkan bahwa ada kenaikan dalam hal pengeluaran sebagai standar hidup layak. Demikian juga halnya dengan Indeks keparahan kemiskinan (P2), juga mengalami penurunan sebesar 0,033 poin, dari 0,376 pada Maret 2021 menjadi 0,343 pada Maret 2022. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan. Kemiskinan dapat juga disebabkan akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia.

Kemiskinan juga dapat terjadi akibat adanya ketimpangan pendapatan. Untuk mengukur besarnya ketimpangan, digunakan koefisien gini atau gini rasio. Angka gini rasio berkisar antara 0-1. Daerah dengan skor gini rasio 0, artinya besar pendapatan di desa tersebut tersebar secara merata, dan skor gini rasio semakin mendekati 1, artinya sebaran pendapatan masyarakat mengalami ketimpangan mendekati sempurna. Data BPS tahun 2022 menunjukkan gini rasio Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,3120, dengan skor gini rasio minimum dan maksimum berturut-turut 0,2090 (Kab. Tapanuli Selatan) dan 0,3990 (Kota Medan). Angka tersebut menunjukkan bahwa besar pendapatan di Sumatera Utara rata-rata terdistribusi merata, gini rasio dibawah 0,4.

Peningkatan produktivitas masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pendapatan. Masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas masyarakat dan peningkatan pengeluaran untuk konsumsi. Kemiskinan dapat dikatakan menurun ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat. Di sisi lain, rendahnya IPM berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan indeks kemiskinan dengan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Sumatera Utara yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### ***Kemiskinan dan Status Gizi***

Kemiskinan dan status gizi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam proses pembangunan. Data menunjukkan adanya hubungan antara kurang gizi dan kemiskinan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya insiden kemiskinan dan status gizi buruk pada balita. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan akan berkontribusi terhadap peningkatan status gizi balita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh yang sangat menghambat pertumbuhan fisik, mental, dan kemampuan berpikir. Dalam proses

pembangunan nasional, pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menjadi prioritas utama. Salah satu komponen penting dalam membangun SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi adalah pembangunan pangan dan gizi, yang akan meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kemandirian nasional.

Masalah gizi terkait dengan masalah kemiskinan, gangguan yang ditimbulkan akibat masalah gizi juga secara simultan dapat berdampak kepada munculnya masalah kemiskinan. Malnutrisi menyebabkan rendahnya kemampuan akademis yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, selain juga dapat menimbulkan masalah gangguan kesehatan dan risiko menderita berbagai penyakit degeneratif yang lebih besar di masa-masa kehidupan selanjutnya. Tentu saja hal ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menanganinya, dan membebani anggaran negara yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan. Diperlukan pendekatan multisektor dalam upaya menyelesaikan masalah gizi. Ketersediaan pangan dengan harga terjangkau, akan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dan, kemampuan mengakses bahan pangan ini termasuk salah satu indikator standar hidup layak yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia.

Stunting adalah salah satu masalah gizi utama yang masih dihadapi sejak usia dini, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) sejak kehamilan sampai pada usia dua tahun



Berdasarkan perbandingan IPM antar Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat IPM di masing-masing Kabupaten/Kota dari tahun sebelumnya. Sebaran Kabupaten/Kota berdasarkan kategori IPM disajikan dalam Table 1.

**Tabel 1. Sebaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Menurut Kategori IPM**

Kabko	Kategori IPM	Jumlah Kabko /Persentase
Tanjung Balai, Kab. Padang Lawas, Kab. Batubara, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kab Nias Barat	Sedang :  ( $0 \leq \text{IPM} < 70$ )	9 (27,3%)
Kota Pematangsiantar, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Padangsidempuan, Toba Samosir, Kab. Karo, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Simalungun, Labuhan Batu, Kab. Labuanbatu Utara, Dairi, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Langkat, Kab. Samosir, Kab. Serdang Bedagai, Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Kota Gunungsitoli	Tinggi :  ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )	23 (69,7 %)
Kota Medan	Sangat Tinggi  ( $\text{IPM} \geq 80$ )	1 (3,0%)

Dari keseluruhan Kabko di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan masuk kategori kota dengan kategori IPM sangat tinggi, mengalahkan 32 Kabko

lainnya. Indeks Pembangunan Manusia terdiri atas beberapa dimensi pendukung yang terdiri atas Umur Panjang dan hidup sehat, diukur dengan berdasarkan umur harapan hidup saat lahir; tingkat pengetahuan, diukur berdasarkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; serta Standar Hidup Layak yang diukur berdasarkan Pengeluaran Riil Perkapita (yang disesuaikan) (BPS 2022).

Sejalan dengan hasil penelitian Ezkiriyanto dan Kindi (2013), bahwa pembangunan suatu wilayah sangat bergantung pada pemerintah daerah. Terbukti bahwa belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berdampak positif dan signifikan pada pembangunan manusia. Selain itu, tingkat pendidikan memengaruhi kemampuan seseorang dan pemahaman mereka tentang teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Peran pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tentang penyediaan infrastruktur dan alokasi anggaran pemerintah menunjukkan kekuatan yang dimilikinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Indikator Kemiskinan dan Hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Tingginya Indeks Pembangunan Manusia, berkorelasi positif dengan tingginya harapan hidup masyarakat, tingkat Pendidikan yang lebih tinggi dan PDB perkapita yang lebih tinggi (UNDP 2013). Ranis (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses

pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu.

Analisis statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara persentase kemiskinan (P0), kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Tabel 2), dengan nilai korelasi masing masing berturut turut -0.738; -0.699 dan -0.659. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Huda (2020), dan Prasetyaningrum dan Sukmawati (2018). Semakin rendah indeks kemiskinan, maka IPM akan semakin tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan pola bahwa kemiskinan secara umum berpengaruh negatif terhadap IPM.

Tabel 2. Korelasi Pearson antara Indeks Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia
Persentase Kemiskinan (P0)	-.699**
Tingkat Kedalaman (P1)	-.659**
Tingkat Keparahan (P2)	-.738**
Rata-Rata Lama Sekolah	.923**
Umur Harapan Hidup	.531**
Harapan Lama Sekolah	.554**
Rata-Rata Pengeluaran	.889**
Gini rasio	.587**

Kualitas SDM sangat diperlukan mendukung kesuksesan proses

pembangunan dalam menurunkan angka kemiskinan. Tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi kualitas SDM. Kualitas pendidikan suatu negara dapat diproksi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa Indeks kemiskinan berhubungan negatif signifikan terhadap rata-rata lama sekolah, dengan skor korelasi P0, P1 dan P2 masing-masing berturut-turut sebesar -0.738; -0,721; -0.691. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks kemiskinan, maka rata-rata lama sekolah akan semakin rendah. Hasil analisis juga menunjukkan adanya korelasi positif signifikan Gini rasio dengan IPM. Skor rata-rata gini rasio di Provinsi Sumatera Utara (0.3120), menunjukkan bahwa distribusi besar pendapatan cenderung tersebar secara merata.

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta derajat kesejahteraan. Semakin lama seseorang mengakses pendidikan, atau semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka produktivitas dapat ditingkatkan dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Purnomo dkk. juga menemukan bahwa tingkat Pendidikan berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Dalam penelitiannya Purnomo juga memasukkan variabel mediasi pendapatan per kapita untuk menganalisis jalur hubungan pendidikan dengan kemiskinan, dan diperoleh model bahwa apabila pendidikan naik 1 tahun maka dapat menurunkan kemiskinan sebesar -6,943972 persen (*ceteris paribus*).

Indeks kemiskinan juga menunjukkan korelasi negatif signifikan dengan besarnya rata-rata pengeluaran, dengan skor korelasi P0, P1 dan P2 berturut-turut sebesar -0,728; -0,700 dan -0.671. Besarnya pengeluaran menunjukkan kemampuan untuk mengakses kehidupan yang layak, yang dapat memenuhi kebutuhan. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat ada dalam kondisi yang tidak miskin. Semakin dalam dan semakin parah tingkat kemiskinan, maka IPM juga akan semakin rendah. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan akan berkontribusi terhadap peningkatan IPM; IPM yang tinggi menyokong peningkatan produktifitas manusia yang disertai dengan peningkatan pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang layak.

### **Indeks Kemiskinan dan Masalah Gizi**

Masalah gizi merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian pemerintah, dan masalah gizi identik dengan kemiskinan. Masalah gizi bukan hanya terkait dengan kesehatan, namun juga merupakan refleksi dari tingkat daya beli, ketersediaan pangan dan faktor sosial budaya lainnya. Meningkatnya harga bahan pokok menimbulkan masalah di masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hal ini akan berdampak kepada tingkat kecukupan gizi masyarakat, dan potensi timbulnya berbagai masalah gizi dan kesehatan.

Menggunakan data dari survei IFLS (gelombang 2000 dan 2007) dan mengontrol sejumlah faktor sosial-ekonomi (karakteristik anak, orang tua,

rumah tangga, akses dan pemanfaatan layanan kesehatan, status pendapatan/aset rumah tangga, dan karakteristik spasial), Silva dan Sumarto (2018) menemukan bahwa pendidikan ibu, kondisi air dan sanitasi, kemiskinan rumah tangga, dan daerah tempat tinggal sangat mempengaruhi malnutrisi kronis pada anak di Indonesia.

Salah satu masalah gizi terkait dengan kemiskinan adalah stunting. Stunting merupakan suatu kondisi kurang gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dari makanan, dan berlangsung dalam waktu yang lama. Stunting masih menjadi masalah gizi utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Berbagai program telah dijalankan pemerintah untuk menurunkan prevalensi stunting, namun belum memberikan dampak yang optimal terhadap penurunan prevalensi stunting. Hal ini dikarenakan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian Muthia et al. (2019) menjelaskan bahwa program pencegahan stunting belum mampu menurunkan prevalensi stunting dikarenakan tidak adanya dana khusus untuk intervensi atau program, masih kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan intervensi atau program, belum adanya pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP), perencanaan tidak dilakukan secara *bottom up* dan belum ada pencatatan dan pelaporan intervensi atau program. Kendala-kendala tersebut menyebabkan program penanganan stunting tidak mencapai targetnya untuk menurunkan prevalensi stunting. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Khoeroh

dan Indriyanti (2017) juga menyampaikan bahwa program-program pencegahan stunting belum berjalan dengan optimal dikarenakan berbagai kendala diantaranya yaitu sumber daya manusia yang masih kurang dan belum ada tenaga gizi.

Hasil analisis statistik menunjukkan ada hubungan negatif antara Indeks Kemiskinan dengan kejadian stunting di Provinsi Sumatera Utara (Tabel 3), meskipun tidak signifikan; dengan skor korelasi P0, P1 dan P2 berturut-turut sebesar -0.391; -0,380; -0,399. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Utara ada di bawah tingkat prevalensi nasional, dimana prevalensi stunting di Sumatera Utara tahun 2022 sebesar 21,1; lebih rendah 0,5 poin dari Prevalensi stunting Nasional sebesar 21,6.

Tabel 3. Korelasi Pearson antara Indeks Kemiskinan dengan *Stunting*

Indeks Kemiskinan	<i>Stunting</i>
Persentase Kemiskinan (P0)	-.391*
Tingkat Kedalaman (P1)	-.380*
Tingkat Keparahan (P2)	-.399*

Hasil analisis menjelaskan bahwa kemiskinan membawa pengaruh negatif terhadap kejadian stunting. Stunting, yang didefinisikan sebagai skor tinggi badan untuk usia yang rendah (HAZ), dimulai dengan berat badan bayi yang rendah dan berlanjut dengan pertumbuhan yang terhambat selama dua tahun pertama kehidupan, dan biasanya tidak dapat diubah. Dari tahun 1990 hingga 2018, prevalensi stunting di

seluruh dunia telah menurun, tetapi stunting masih dialami oleh sebanyak 21,3% anak di bawah usia 5 tahun di seluruh dunia. Kemiskinan menjadi faktor yang mendasari, selain infeksi dan diet yang kurang berkualitas (Roediger 2020). Pada anak-anak, penyebab stunting melibatkan banyak faktor, dan salah satunya adalah kelahiran bayi dengan berat badan rendah (BBLR). Secara nasional, prevalensi BBLR pada anak usia 6-11 bulan, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 5,1 meningkat menjadi 5,8. Di Provinsi Sumatera Utara, angka kejadian BBLR relative rendah, kecuali di beberapa daerah. Hasil uji statistik tidak menunjukkan adanya hubungan antara BBLR dan Stunting.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *stunting*, antara lain yaitu memberikan edukasi pada pihak terlibat pencegahan stunting seperti kader, ibu balita, ibu hamil, dan wanita usia subur atau calon pengantin yang nantinya juga akan menjadi calon ibu. Berbagai metode dapat diterapkan sebagai upaya memberikan edukasi diantaranya seperti konseling, ceramah dan pelatihan. Salah satu pendekatan yang efektif untuk memberdayakan para ibu balita, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara membentuk kelompok belajar. Kelompok belajar ini nantinya akan menjadi wadah belajar dan berdiskusi ibu-ibu balita secara mandiri yang didampingi oleh fasilitator kesehatan. Selain itu, pemberian makanan tambahan pada balita juga dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan stunting. Makanan tambahan yang diberikan dapat

dikembangkan menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, berbasis lokal namun berpotensi tinggi seperti tanaman kelor atau moringa oleifera (Fitri *et.al.* 2022).

Untuk mengukur besar pengaruh kemiskinan (P0) terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara, dilakukan analisis regresi sederhana (Tabel 4). Dapat diinterpretasikan bahwa ketika persentase kemiskinan (P0) dan Gini Rasio adalah nol, maka IPM adalah sebesar 63,812; saat kemiskinan naik sebesar 1%, akan menurunkan IPM sebesar 0,615.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi antara IPM, Kemiskinan dan Gini Rasio

		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	63.812	2.805		22.745	.000
	Gini Rasio	53.761	9.151	.507	5.875	.000
	P0	-.615	.086	-.620	-7.178	.000

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa kemiskinan secara signifikan akan memberi pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara, semakin tinggi kemiskinan (P0), maka IPM akan semakin rendah. Untuk mengukur besarnya kontribusi kemiskinan dan ketimpangan terhadap IPM maka dilakukan uji Koefisien Determinasi (*R Square*). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2022, kemiskinan dan ketimpangan secara bersama-sama berkontribusi sebesar 77.4 % terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara, dan

sisanya sebanyak 22,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dkk. 2022 yang melakukan analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta, menunjukkan hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini, kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi secara signifikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jika IPM naik 1% maka kemiskinan akan berkurang sebesar 82,754%.

## SIMPULAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kategori tinggi, bahkan untuk kota Medan masuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Implikasi dari hasil penelitian ini, bahwa Pemerintah Sumatera Utara berhasil menurunkan kemiskinan, sejalan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Menggunakan data BPS tentang penurunan berbagai indeks kemiskinan (P0, P1 dan P2), ada konsistensi antara penurunan Indeks Kemiskinan dengan peningkatan IPM di Provinsi Sumatera Utara. Berbagai komponen dari Indeks Pembangunan Manusia antara lain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. Jika kemiskinan naik sebesar 1%, maka IPM akan turun

sebesar 0,615. Hasil analisis regresi linier yang dilakukan untuk menghitung besarnya kontribusi kemiskinan dan ketimpangan terhadap IPM, diperoleh bahwa kemiskinan dan ketimpangan secara bersama-sama berkontribusi sebesar 77.4 % terhadap IPM.

Selain itu, terdapat korelasi negatif antara IPM dengan kejadian Stunting, meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan stunting, dan perlu perhatian serius untuk menanganinya karena stunting yang dialami seseorang juga dapat membawa pengaruh tidak menguntungkan terhadap status kesehatan dan kualitas hidup di tahap kehidupan selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitian Silva dan Sumarto (2018) dapat diketahui bahwa kemiskinan rumah tangga mejadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi munculnya masalah-maslah terkait gizi dan malnutrisi kronis pada anak di Indonesia, selain pendidikan ibu, kondisi air dan sanitasi, dan daerah tempat tinggal. Temuan ini memiliki implikasi kebijakan penting dan merupakan langkah lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang kompleks dalam malnutrisi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2022. <https://sumut.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik. 2022. Profil Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Maret 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Fitri JR, Huljannah N, Rochmah TN, 2022. Program Pencegahan Stunting di Indonesia: A systematic review. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*: 17(3): 281-292.
- Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hawari A. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pendidikan terhadap IPM 34 Provinsi di Indonesia 2017-2019
- Huda DAN. 2020. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Multidimensional di Negara Berkembang dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik. *Statistika*, Vol. 20 No. 2, 75 – 82
- Khoeroh, H., Handayani, O.W.K., Indriyanti, D.R. (2017). Evaluasi Penatalaksanaan Gizi Balita Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Sirampog. *Unnes Journal of Public Health*, 6 (3): 189-195. <https://doi.org/10.15294/uiph.v6i3.11723>
- Muthia, G., Edison, Yantri, E. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting Ditinjau dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK Di Puskesmas Pegang Baru Kabupaten Pasaman. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8 (4): 100-108
- Prasetyaningrum dan Sukmawati, 2018. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor 2, 2018, 217 – 240. P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316.
- Purnomo SD, Istiqomah, Suharno 2020. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan : Pendekatan Variabel Mediasi Pendapatan Perkapita. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.6 :539-560
- Ramdhani N, Anggraeni Y, Desmawan D. 2022. Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi DKI. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Vol.1 No.2.
- Ranis, G. dan Stewart, F. 2006. "Successful Transition towards a Virtuous Cycle of Human Development and Economic Growth: Country Studies". Center Discussion Paper No. 943.
- Roediger R, Hendrixson DY, Manary MJ. 2020. A Roadmap to reduce stunting. *The American Journal of Clinical Nutrition* : vol 112, Supplement 2. Pages 773S-776S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa205>
- Silva ID dan Sumarto S, 2018. Child Malnutrition In Indonesia : Can Education, Sanitation

- and Helathcare Augment The Role of Income?. *Journal of International Development*. Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com).doi : 10.1002/jid.3365
- Sofilda, Eleonora et al., "Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression)", *OIDA International Journal of Sustainable Development* 06:06 (2013): 51-62. Diakses 6 April 2018. [Http://www.oidaiisd.com](http://www.oidaiisd.com).
- The World Bank, 2022. Poverty, Overview. <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>. Diakses 26 Juni 2023.
- Understanding Development and Poverty Alleviation, 2019. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019.
- United Nation Indonesia. <https://indonesia.un.org/en/92873-indonesia-breaks-high-human-development-category-group>
- United Nations Development Programme (UNDP). Reports (1990–2013) Human development reports (HDR). [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013\\_en\\_complete.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf). Retrieved 22 Sept 2013. 10. Barfield WD. Standard terminology for fetal, infant, and perinatal.
- World Health Organization 2014. Global nutrition targets 2025: low birth weight policy brief. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14>.
- Zuniga JM, Marks SP, Gostin LO. 2013. *Advancing the Human Right to Health*. New York (US): Oxford University Press.